

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA
PEMATANGSIANTAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

N a m a : AGUSTINA VIDI RAHAYU
N P M : 1305170066
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2017**

ABSTRAK

Agustina Vidi Rahayu (1305170066). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar, Skripsi 2017

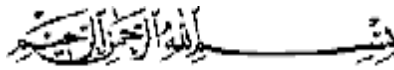
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai analisis kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar periode 2011-2015

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi . Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015 dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dan belanja, rasio kemandirian keuangan, efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, belanja rutin dan belanja pembangunan, belanja operasi dan belanja modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam merealisasikan pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2011 sampai 2015 dikatakan baik. Pada tahun 2011 sampai 2015 Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam rasio kemandirian keuangan dikatakan kurang baik. Dalam merealisasikan pajak daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 2011 sampai 2015 dikatakan kurang efektif dan kurang efisien serta dalam penilaian kinerja dikatakan kurang baik. Belanja rutin dan belanja pembangunan pada tahun 2011 sampai 2015 dikatakan cukup baik, belanja operasi dan belanja modal dikatakan cukup baik.

Kata Kunci : Kinerja, Pendapatan dan Belanja

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah... segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rezeki, kesehatan, rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dan penyelesaian skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan, baik dari segi teknis, waktu, tenaga serta biaya.

Namun dengan petunjuk dari Allah SWT serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang istimewa keluarga penulis. Kedua orang tua penulis, Ayahanda terhormat Wahyudianto dan Ibunda tercinta Sugiarti yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis. Tidak lupa juga kakak-kakak penulis, Pradita Atmasari dan Windi Aryuni serta abang

penulis Heru Pratomo Putra yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis termotivasi menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak DR. Agussani M, AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
4. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si. Selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
6. Bapak Pandapotan Ritonga, SE, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Sukma Lesmana, SE, M.Si. Selaku Dosen Penasehat Akademik Kelas Akuntansi B-Pagi Stambuk 2013 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam segala urusan akademik.
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang telah memberikan pengajaran dan motivasi kepada penulis selama ini.
9. Seluruh Staf Biro Akuntansi yang telah membantu penulis dalam segala hal urusan administrasi dan birokrasi.
10. Bapak Acai Tagor Sijabat, AP, M.Si, Selaku Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar.

11. Ibu Hj. Masni SH, Selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
12. Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah PEMKO Pematangsiantar ,Kak Ayu, Kak dina dan Bang Erik yang telah membantu penulis dalam Administrasi Kelengkapan Skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman kelas Akuntansi B-Pagi Stambuk 2013 yang telah memberikan bantuan dan masukan yang berarti bagi penulis dari awal kuliah hingga saat penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman kelas Akuntansi F-Malam Stambuk 2013 yang telah memberikan bantuan dan masukan yang berarti bagi penulis.
15. Seluruh kader-kader PMB FEB, PMB FKIP, PMB FAHUM, PMB FAPERTA.
16. Kak Kiki Rizki Ana Pohan yang sudah penulis anggap seperti kakak sendiri, yang telah banyak memberikan ilmunya, motivasi dan semangat kepada penulis.
17. Sahabat-sahabat saya Ira Irianto Dalimunthe, Mindo Astika Putri, Eky Sartika Sinaga, Reni Mastura, Retno Putri Lestari, Diah Ismaya Karo-karo dan Mutiara Pertiwi Hasibuan yang telah memberikan bantuan dan masukan yang berarti bagi penulis.
18. Seseorang yang spesial Mulia Parlindungan Rambe, S.E yang selalu memotivasi, mensupport, memberikan bantuan yang sangat berarti bagi penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna, pemilihan bahasa maupun sistematika penulisannya, namun penulis mengharapkan bantuan berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan mutu penulisan skripsi ini.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan pembaca khususnya serta mendapat keridha'an Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2017

Penulis

Agustina Vidi Rahayu

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Perumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	9
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	9
2. Klasifikasi Pendapatan dalam APBD	11
3. Klasifikasi Belanja dalam APBD	14
4. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	18
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	32

B. Definisi Operasional Variabel.....	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Pematangsiantar	38
2. Deskriptif Data pada Analisis Kinerja Pendapatan	39
3. Deskriptif Data pada Analisis Kinerja Belanja	47
B. Pembahasan	52
1. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah	52
2. Membandingkan Antara Teori dan Praktek Yang Diterapkan Pemerintah Kota Pematangsiantar Serta Memberikan Suatu Perbaikan Yang Diperlukan	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Keterbatasan.....	64
C. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015.....	4
Tabel I.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015.....	5
Tabel II.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	21
Tabel II.2	Kriteria Presentase Kinerja Keuangan Rasio Efektifitas	22
Tabel II.3	Kriteria Presentase Kinerja Keuangan Rasio Efisien	23
Tabel II.4	Penelitian Terdahulu	27
Tabel III.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	33
Tabel III.2	Kriteria Presentase Kinerja Keuangan Rasio Efektifitas	33
Tabel III.3	Kriteria Presentase Kinerja Keuangan Rasio Efisien.....	34
Tabel III.4	Waktu Penelitian	36
Tabel IV.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015.....	39
Tabel IV.2	Komponen Pendapatan Daerah Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015.....	41
Tabel IV.3	Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015.....	42
Tabel IV.4	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015.....	44

Tabel IV.5	Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015.....	46
Tabel IV.6	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015.....	48
Tabel IV.7	Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015.....	49
Tabel IV.8	Belanja Operasi dan Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berfikir	29
-------------	-------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan	40
Grafik 2	Kemandirian Keuangan Daerah.....	43
Grafik 3	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	45
Grafik 4	Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.....	47
Grafik 5	Anggaran dan Realisasi Belanja	48
Grafik 6	Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan	50
Grafik 7	Belanja Operasi dan Belanja Modal.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelola keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan daerah mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, efektivitas (value for money) untuk kegiatan masyarakat. Oleh sebab itu, APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk sesuatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005).

Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang public dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran

tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2002 : 209).

Salah satu cara untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis selisih (varians) anggaran realisasi pendapatan dan belanja, analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dengan analisis rasio keuangan, pemerintah daerah dapat dinilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas, mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya apakah lebih dominan pada belanja pertumbuhan bagaimana pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam mempertahankan maupun meningkatkan kinerja yang telah dicapainya, serta menganalisis belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total belanja langsung dan analisis belanja operasi serta menganalisis belanja langsung dan tidak langsung serta kebutuhan fiskal untuk mendukung pelayanan publik (Abdul Halim : 2007).

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat kita lihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menjadi salah satu Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Pengukuran kinerja Sektor publik dilakukan untuk memenuhi

tiga maksud, Pertama untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimasukkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik. Kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2004: 121).

Adapun pendekatan kinerja APBD sebagai berikut (Nirzawan, 2001: 81) : sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan dan bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan

Penilaian Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. Berikut ini adalah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar selama 5 Tahun Terakhir :

Tabel I.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada Pemerintah Kota
Pematangsiantar Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
2011	588.577.194.989,24	565.383.728.318,97	96,06	23.193.466.670,17
2012	687.718.347.433,00	669.207.445.543,98	97,31	18.510.901.889,02
2013	752.931.715.144,00	731.041.119.468,49	97,09	21.890.595.675,51
2014	886.658.524.116,58	831.765.871.272,76	93,81	54.892.652.843,82
2015	940.139.328.400,40	891.378.886.503,26	94,81	48.760.441.897,14

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2011-2015

Dilihat dari tabel I.1 di atas bahwa dari tahun 2011 s/d 2015 pada anggaran dan realisasi pendapatan pada kota pematang siantar dimana pada tahun 2011 selisih antara anggaran dan realisasinya mencapai Rp23.193.466.670,17 atau 96,06% . Namun pada tahun 2012 selisih antara anggaran dan realisasinya mencapai (Rp18.510.901.889,02) atau 97,31%. Selanjutnya pada tahun 2013 selisih antara anggaran dan realisasinya mencapai Rp21.890.595.675,51 atau 97,09% . Selanjutnya pada tahun 2014 selisih antara anggaran dan realisasinya mencapai Rp54.892.652.843.82 atau 93,81%. Dan pada tahun 2015 selisih antara anggaran dan realisasinya mencapai Rp48.760.441.897,14 atau 94,81%.

Menurut Halim (2004: 20) Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Penilaian kinerja pendapatan daerah telah terlampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh.

Berikut ini adalah Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar selama 5 Tahun Terakhir.

Tabel I.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar
Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
2011	605.675.217.770,81	564.819.922,154,76	93,25	40.855.295.616,05
2012	699.561.538.421,72	639.607.159.845,00	91,43	59.954.378.576,72
2013	791.040.615.348,43	741.073.062.641,54	93,68	49.967.552.706,89
2014	909.447.084.012,15	774.365.721.075,38	85,15	135.081.362.937,77
2015	1.005.717.689.322,35	884.146.657.675,53	87,91	121.571.031.646,82

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2011-2015

Dilihat dari tabel I.2 di atas bahwa dari tahun 2011 s/d 2015 pada anggaran dan realisasi belanja pada kota pematang siantar dimana pada tahun

2011 selisih antara anggaran dan realisasinya mencapai Rp40.855.295.616,05 atau 93,25% . Namun pada tahun 2012 selisih antara anggaran dan realisasinya mencapai Rp59.954.378.576,72 atau 91,43% . Selanjutnya pada tahun 2013 selisih antara anggaran dan realisasinya mencapai Rp49.967.552.706,89 atau 93,68% . Selanjutnya pada tahun 2014 selisih antara anggaran dan realisasinya mencapai Rp135.081.362.937,77 atau 85,15% Dan pada tahun 2015 selisih antara anggaran dan realisasinya mencapai Rp121.571.031.646,82 atau 87,91% .

Menurut Halim (2004 : 22) Analisis terhadap kinerja belanja daerah di nilai baik apabila realisasi lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

Penilaian Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan (Nirzawan : 2011: 81).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Pematang Siantar**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Realisasi Pendapatan beberapa tahun belum mencapai target (anggaran)
2. Anggaran Belanja mengalami peningkatan setiap tahunnya

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah yang terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam mengukur kinerja keuangan pendapatan daerah terdapat 3 analisis perhitungan tetapi peneliti hanya menggunakan analisis varians(selisih) dan analisis rasio keuangan (rasio kemandirian keuangan dan rasio efektivitas & efisiensi) dan dalam mengukur kinerja keuangan belanja daerah terdapat 4 analisis perhitungan peneliti hanya menggunakan analisis varians(selisih), analisis keserasian belanja (rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan, rasio belanja operasi dan rasio belanja modal).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menganalisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kota Pematang Siantar selama 5 tahun terakhir.

Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama periode yang ditentukan.
2. Bagi Pemerintah Kota Pematang Siantar, dapat memberikan sumbangan pikiran di dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Bagi perkembangan pengetahuan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya mengenai pengukuran kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian APBD

Pada permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember”. Sedangkan, menurut Bastian (2006: 189), “APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”.

Adapun struktur APBD berdasarkan permendagri nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari 3 bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

1) Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva/penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendapatan dapat berupa arus kas aktiva masuk, peningkatan aktiva/pengurangan utang yang bukan berasal dari kontribusi ekuitas pemerintah daerah.

2) Belanja Daerah

Menurut IASC Framework, penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar/depleksi asset/terjadinya utang yang mengalokasikan berkurangnya ekuitas dana. Menurut

Halim (2002 : 54) definisi atau pengertian Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutupi deficit anggaran/sebagai alokasi surplus anggaran adanya pos pembiayaan merupakan upaya APBD makin inovatif.

b. Tujuan dan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Adapun tujuan dari APBD adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Pasal 66, Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

- 1) Fungsi Otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- 2) Fungsi perencanaan mengandung makna anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

- 3) Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
- 4) Fungsi distribusi mengandung makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 5) Fungsi stabilitas memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2. Klasifikasi Pendapatan dalam APBD

Pendapatan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Halim, 2004). Pendapatan dalam APBD dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004).

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Daerah
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan Kepemendagri Nomor 35 tentang pajak daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN,
dan
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup.

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- b) Jasa giro,
- c) Pendapatan bunga,
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,
- e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah,
- f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- h) Pendapatan denda pajak,

- i) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
- j) Pendapatan dari pengembalian,
- k) Pendapatan dari angsuran cicilan,
- l) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
- m) Fasilitas sosial dan fasilitas umum,
- n) Hasil pengelolaan dana bergulir dana.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Halim : 2004).

Dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a) Dana Bagi Hasil
- b) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
- c) Bagi hasil pajak
- d) Bagi hasil bukan pajak
- e) Dana Alokasi Umum
- f) Dana Alokasi Khusus.
- g) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:
- h) Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam,
- i) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota,

- j) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak meningkat,
- k) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya, dan
- l) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu. Dengan kata lain lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lazio, Sonny: 2014: 23).

3. Klasifikasi Belanja dalam APBD

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Belanja terdiri dari:

- a) Belanja Aparatur Daerah,
- b) Belanja Pelayanan Publik,
- c) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan
- d) Belanja Tidak Tersangka.

Masing-masing Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal. Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah, yaitu:

- a) Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana,
- b) Prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun Anggaran yang bersangkutan, dan
- c) Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan,
- b) Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang,
- c) Piutang mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

a. Belanja Administrasi Umum

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri dari 4 jenis, yaitu:

- a) Belanja pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
- b) Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- c) Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
- d) Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Saran dan Prasarana Publik

Pemeliharaan sarana dan prasarana publik merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan public. Kelompok belanja ini meliputi:

- a) Belanja pegawai (Belanja Operasi dan Pemeliharaan Saran dan Prasarana Publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personal yang berhubungan langsung dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.

- b) Belanja barang (Belanja Operasi dan Pemeliharaan Saran dan Prasarana Publik) merupakan keluaran pemerintah daerah untuk biaya penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- c) Belanja perjalanan (Belanja Operasi dan Pemeliharaan Saran dan Prasarana Publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung pelayanan publik.
- d) Belanja pemeliharaan (Belanja Operasi dan Pemeliharaan Saran dan Prasarana Publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja langsung dalam APBN/APBD. Menurut Erlina dan Rasdianto (2013) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang sumber manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset (Permendagri 13 Tahun 2006). Dalam lampiran III PMK No. 101/PMK.02/2011 belanja modal dipergunakan untuk antara lain: Belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya, dan belanja modal badan layanan umum (BLU).

Belanja modal dibagi menjadi:

- a) Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum
- b) Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.

d. Belanja Transfer

Merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan keuangan tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:

- a) Angsuran pinjaman
- b) Dana bantuan
- c) Dana cadangan
- d) Belanja tak terduga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa. Menurut Nurlan (2008) menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengambilan atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

4. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Bastian (2006: 274), “Kinerja anggaran adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi”. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat, dan dampak. Analisis kinerja anggaran dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bagian (Mahmudi, 2007) yaitu :

a. Analisis Kinerja Pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik (Halim : 2004). Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah terlampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah dengan cara :

a) Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis Varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang di anggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah di informasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dainggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik (Halim : 2004). Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih

realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).

b) Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Analisis Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negative, maka hal ini menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan (Abdul Halim : 2004). Adapun rumus dalam analisis rasio pertumbuhan pendapatan adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan PAD Tahun } t = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t-1}{\text{PAD Tahun } t-1} \times 100\%$$

c) Analisis Rasio Keuangan

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Abdul Halim, 231). Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim 2002 : 126).

Sedangkan analisis rasio keuangan adalah suatu cara untuk membuat perbandingan data keuangan, sebagai dasar untuk mengetahui kinerja keuangan

suatu lembaga (Samryn, 324). Adapun rasio keuangan APBD adalah sebagai berikut:

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Abdul Halim : 232).

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun rumus dari rasio kemandirian keuangan daerah ini adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun tabel dalam rasio kemandirian keuangan daerah adalah :

Tabel II.1

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0 – 25
Rendah	>25 – 50
Sedang	>50 – 75
Tinggi	>75 – 100

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 21).

Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Abdul Halim : 233).

2) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Abdul Halim: 234). Untuk menghitung rasio efisiensi pendapatan asli daerah memiliki rumus dari rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah ini adalah :

$$R.Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasar Potensi Rill Daeah}} \times 100\%$$

Adapun tabel rasio efektif dalam kriteria kinerja keuangan adalah :

Tabel II.2

Kriteria Presentase Kinerja Keuangan Rasio Efektif

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
79% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011 : 170).

Kemampuan daerah dalam menjelaskan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Abdul Halim : 234).

Sedangkan Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Abdul Halim: 235). Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Adapun rumus rasio efisien ini adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Adapun tabel rasio efisiensi dalam kriteria kinerja keuangan adalah :

Tabel II.3

Kriteria Presentase Kinerja Keuangan Rasio Efisien

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
<5%	Sangat Efisien
5% - 10%	Efisien
11% - 20%	Cukup Efisien
21% - 30%	Kurang Efisien
30%	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2011 : 171)

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Abdul Halim : 235).

3) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal (Halim : 237). Secara sederhana rasio aktivitas ini dapat dirumuskan adalah :

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk

menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim : 238).

b. Analisis Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (value for money). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran (Mardiasmo: 2004). Kinerja anggaran belanja daerah di nilai baik apabila realisasi lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Dalam hal belanja daerah penting juga di analisis keserasian belanja karena hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi.

Berdasarkan informasi pada laporan realisasi anggaran kita dapat melakukan analisis anggaran belanja dengan cara :

a) Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang biasa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau presentasenya. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih rendah dari yang dianggarkan, jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu

mengidentifikasi adanya kinerja anggaran yang kurang baik (Mardiasmo : 2004).

1) Analisis KecerAsian Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Analisis keserasian belanja antara lain berupa :

a) Analisis Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja

Adapun rumus dari analisis belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap belanja adalah :

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Belanja Modal terhadap Total Belanja

Adapun rumus dari analisis belanja operasi terhadap total belanja dan belanja modal terhadap total belanja adalah :

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

c) Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Adapun rumus dari analisis belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah:

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih rendah dari yang dianggarkan, jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengidentifikasi adanya kinerja anggaran yang kurang baik (Mardiasmo : 2004).

2) Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolute, tetapi relative. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah lebih efisien dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengidentifikasi terjadinya pemborosan anggaran (Abdul Halim : 2004).

3) Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor

makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

c. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan untuk pola anggaran pemerintah daerah. Selain itu juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan anggaran pemerintah daerah. Salah satu pos yang paling urgent dalam pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Makin besarnya SILPA yang diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran.

Dengan melihat kinerja pendapatan, kinerja belanja dan kinerja pembiayaan, maka dapat dinilai kinerja anggaran (APBD) secara umum. Jika semua kinerja tersebut menunjukkan pencapaian angka yang sudah ditargetkan, maka dikatakan kinerja anggaran (APBD) adalah baik (Mardiasmo : 2004).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Sandy Candra Saputra, dkk	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten	Variabel yang digunakan adalah Kinerja Anggaran Pendapatan dan Kinerja Belanja Daerah	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa varian pendapatan termasuk dalam kategori baik, rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang, rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali, rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan	e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016)

		Jembaran		pertumbuhan yang positif, varian belanja termasuk dalam kategori baik, rasio keserasian belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak dari pada belanja operasional, rasio belanja termasuk dalam kategori efisien.	
2.	Addina Marizka (2010)	Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan	Variabel yang digunakan adalah Kinerja Anggaran Pendapatan dan Kinerja Anggaran Belanja Daerah	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota dalam merealisasikan pendapatan pada tahun 2003-2007 dapat dikatakan efektif dan efisiensi, pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2003-2007 Pemerintah Kota Medan masih tergantung pada pemerintah pusat sehingga penyelenggaraan desentralisasi masih rendah. Dalam merealisasikan anggaran belanja dikatakan cukup efisien dan pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan yang positif yang diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan.pada pembiayaan adanya perkembangan SILPA yang bersaldo positif menunjukkan kesehatan fiskal. Kelebihan dana dialokasikan dalam bentuk investasi berupa penyertaan modal pada BUMD sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah Pemerintah Kota Medan.	SKRIPSI
3	Kiki Rizki Ana Pohan (2015)	Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Variabel yang digunakan adalah Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun 2010-	SKRIPSI

		Pemerintah Provinsi Sumatera Utara		2013 dikatakan baik dan pertumbuhan pendapatan dikatakan cukup baik. Pada tahun 2010-2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rasio kemandirian keuangan dikatakan cukup baik. Dalam merealisasikan pajak daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2013 cukup efektif dan efisien serta dalam penilaian kinerja dikatakan baik. Belanja rutin dan belanja pembangunan dikatakan cukup baik,. Dalam merealisasikan anggaran belanja dapat dikatakan efisien dan pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan yang positif yang diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan.	
--	--	------------------------------------	--	--	--

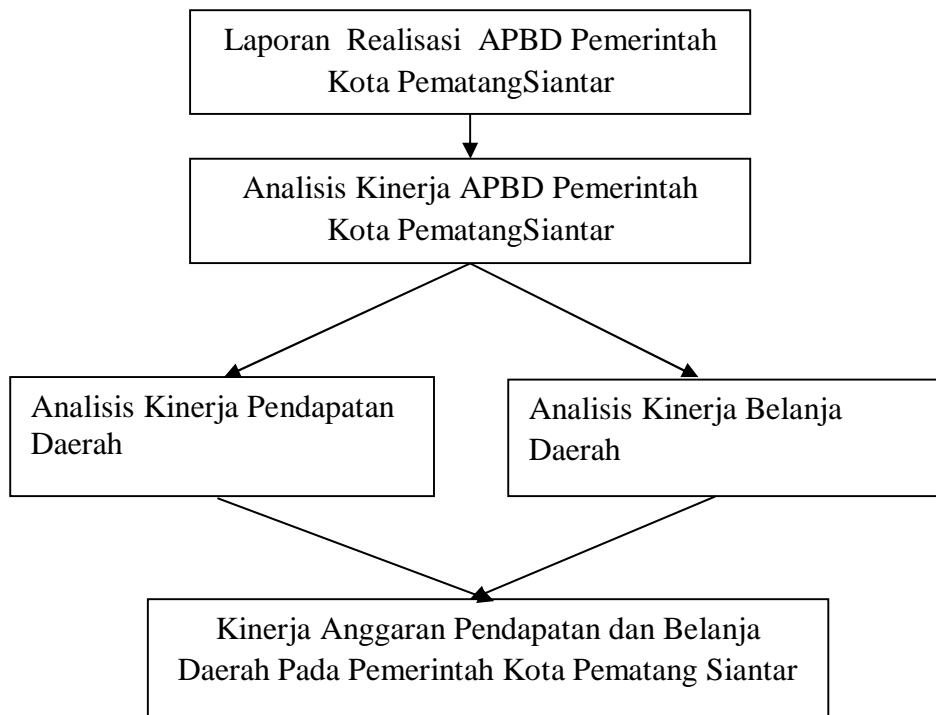
C. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan penjelasan ilmiah mengenai preposisi antarkonsep/antarkonstruksi atau pertautan/hubungan antarvariabel penelitian. Peraturan atau hubungan antarvariabel ini penting dikemukakan sebagai landasan untuk merumuskan masalah.

Adapun kerangka berpikir penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan pada pemerintah kota pematang siantar. Laporan keuangan daerah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD/Laporan Pertanggungjawaban, gunanya dalam pelaporan keuangan pemerintah kota pematang siantar mengenai posisi keuangan pemerintah kota pematang siantar

yang bermanfaat bagi para pengguna informasi dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Alat Ukur yang digunakan peneliti adalah Analisis Kinerja APBD, dimana alat ukur tersebut membantu dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah. Hasil dari pengukuran analisis kinerja APBD merupakan penentuan hasil kinerja pada pemerintah kota pematang siantar dalam merealisasikan anggarannya. Analisis Kinerja APBD dapat dilakukan dalam dua bagian, yaitu Analisis Kinerja Pendapatan Daerah dan Analisis Kinerja Belanja Daerah. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah dapat menunjukkan seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah. Tingginya tingkat kemandirian daerah maka semakin baik juga kualitas pelayanan publiknya. Analisis Kinerja Pendapatan dapat dinilai berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan dapat dihitung dengan cara Analisis Varians(selisih) Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, dan Analisis Rasio Keuangan. Analisis Kinerja Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif, efisien dan ekonomis pemerintah daerah telah menggunakan APBD. Berdasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran dapat dilakukan Analisis Kinerja Belanja Daerah dengan cara Analisis Varians(selisih) Belanja Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah, Analisis Keserasian Belanja Daerah, dan Analisis Efisiensi Belanja Daerah. Melihat Kinerja Anggaran Pendapatan Daerah dan Kinerja Anggaran Belanja Daerah, maka dapat dinilai Kinerja Anggaran APBD secara umum, jika semua Kinerja Anggaran tersebut menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka dikatakan Kinerja Anggaran APBD adalah baik. Berikut ini merupakan bentuk kerangka berpikir peneliti :



Gambar : II.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh penelitian dan subjek beberapa individu, organisasional, industri atau perspektif lain. Selain itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

F. Definisi Operasional Variabel

Adanya definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu faktor berkaitan dengan variasi pada suatu variabel atau lebih faktor lain dan juga mempermudah pemahaman dalam membahas penelitian ini.

Variabel penelitian ini adalah : Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Pematang Siantar adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

a. Analisis Kinerja Pendapatan

Dalam menganalisis pendapatan dapat digunakan beberapa Rasio keuangan daerah yaitu :

- 1) Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan
- 2) Analisis Rasio Keuangan
 - a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel III.1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0 – 25
Rendah	>25 – 50
Sedang	>50 – 75
Tinggi	>75 – 100

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 21).

Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Abdul Halim : 232).

- b) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD pada potensi rill daerah}} \times 100\%$$

Tabel III.2
Kriteria Presentase Kinerja Keuangan Rasio Efektif

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99 %	Cukup Efektif
79% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011 : 170).

Kemampuan daerah dalam menjelaskan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Abdul Halim : 234).

Sedangkan rumus ratio efisiensi adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel III.3

Kriteria Presentase Kinerja Keuangan Rasio Efisien

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
<5%	Sangat Efisien
5% - 10%	Efisien
11% - 20%	Cukup Efisien
21% - 30%	Kurang Efisien
30%	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2011 : 171)

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Abdul Halim : 235).

b. Analisis Kinerja Belanja

- 1) Analisis Varians (Selisih) Anggaran Belanja
- 2) Analisis Keserasian Belanja
 - a) Analisis Belanja Rutin

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

3) Analisis Pertumbuhan Belanja

Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih rendah dari yang dianggarkan, jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengidentifikasi adanya kinerja anggaran yang kurang baik (Mardiasmo : 2004).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Pematang Siantar di bagian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kantor Walikota Pematang Siantar di JL. Merdeka No. 06 Pematang Siantar

Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian bagi penulis melakukan penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017.

TABEL III.4
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Pra Riset																				
3.	Penyusunan Proposal																				
4.	Penyelesaian Proposal																				
5.	Seminar Proposal																				
6.	Pengumpulan Data																				
7.	Pengolahan Data																				
8.	Sidang Meja Hijau																				

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis data yang diperoleh adalah data kuantitatif (data yang dinyatakan dalam bentuk angka).
2. Sumber data : Data sekunder (data yang diperoleh dari pemerintah berupa laporan keuangan pemerintah, struktur organisasi, sejarah pemerintahan dan lain-lain).

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Teknik Dokumentasi Mengumpulkan data-data yang ada dalam pemerintahan yang berhubungan dengan penelitian ini

seperti sejarah pemerintahan, kegiatan operasional pemerintahan, visi, misi, struktur organisasi pemerintahan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan diinterpretasikan sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Dengan cara :

1. Mengumpulkan data-data keuangan yang berhubungan dengan penelitian yaitu laporan realisasi anggaran selama 5 tahun.
2. Menghitung rasio keuangan daerah pada setiap jenis rasio keuangan daerah antara lain : analisis varians (selisih) anggaran pendapatan, rasio kemandirian keuangan daerah, analisis rasio keuangan, rasio efektivitas, analisis varians(selisih) belanja, analisis belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total belanja, analisis pertumbuhan belanja.
3. Menginterpretasikan hasil perhitungan rasio keuangan daerah dikaitkan dengan kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Pematangsiantar

Pemerintah Kota Pematangsiantar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kota Pematangsiantar merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terletak pada garis $2^{\circ} 53' 20''$ - $3^{\circ} 01' 00''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 1' 00''$ - $6' 35''$ Bujur Timur. Pemerintah Kota Pematangsiantar terdiri atas 8 Kecamatan dan 53 Kelurahan. Wilayah Kota Pematangsiantar seluas 79.970 Km² terletak 400-500 meter diatas permukaan laut dan merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Utara setelah Medan.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Pematangsiantar merupakan daerah kerajaan. Pematangsiantar yang berkedudukan di Pulau Holing dan raja terakhir dari dinasti ini adalah keturunan marga Damanik yaitu Tuan Sangnawaluh Damanik yang memegang kekuasaan sebagai raja tahun 1906

Setelah Belanda memasuki Daerah Sumatera Utara, daerah Simalungun menjadi daerah kekuasaan Belanda sehingga pada tahun 1907 berakhir kekuasaan raja-raja. Kontroler Belanda dipindahkan ke Pematangsiantar. Sejak itu Pematangsiantar berkembang menjadi daerah yang banyak dikunjungi pendatang baru, Bangsa Cina mendiami kawasan Timbang Galung dan Kampung Melayu.

2. Deskriptif Data pada Analisis Kinerja Pendapatan

Dengan menggunakan data APBD dan Realisasi APBD, dilakukan Analisis Pendapatan dengan menggunakan alat ukur kinerja:

a. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis Varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Adapun tabel dalam analisis varians (selisih) anggaran pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pada Pemerintah Kota
Pematangsiantar Tahun 2011-2015

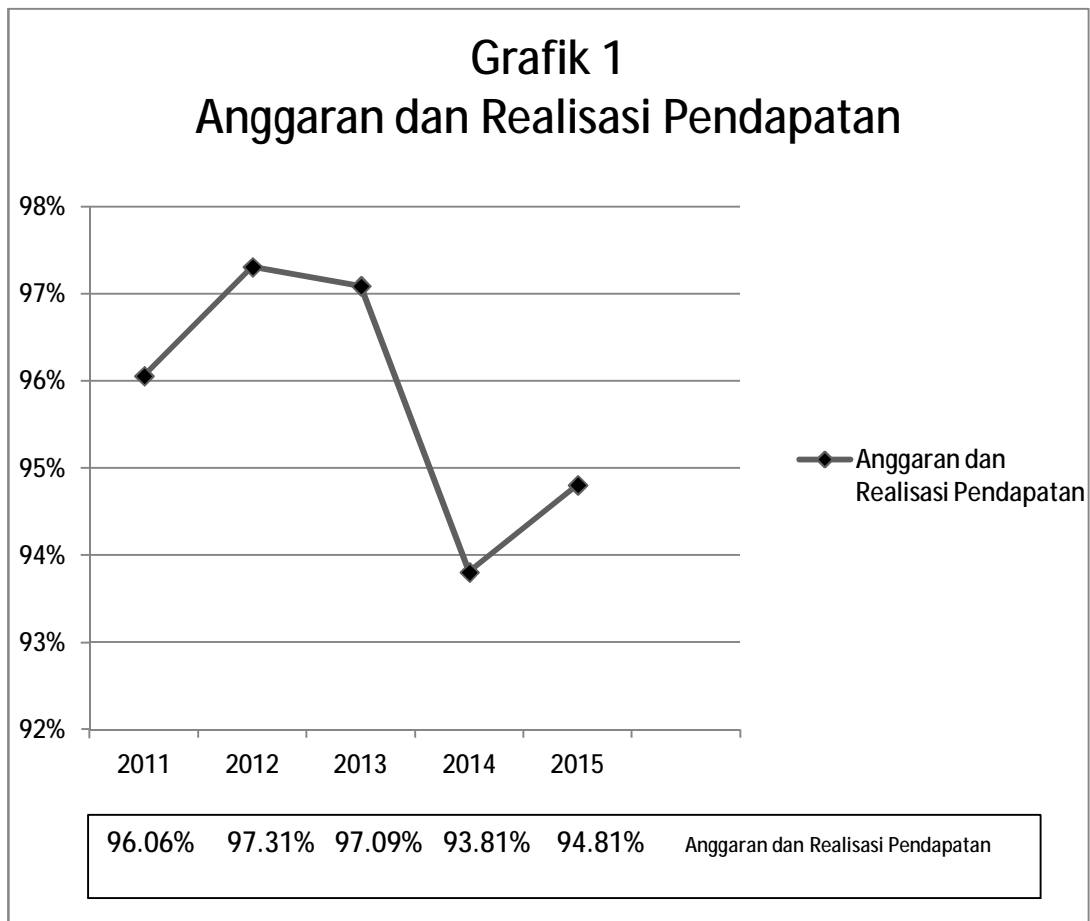
Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Rata-rata %	Selisih	
					Rp	%
2011	588.577.194.989,24	565.383.728.318,97	96,06	95,82	23.193.466.670,17	3,94
2012	687.718.347.433,00	669.207.445.543,98	97,31		18.510.901.889,02	2,69
2013	752.931.715.144,00	731.041.119.468,49	97,09		21.890.595.675,51	2,90
2014	886.658.524.116,58	831.765.871.272,76	93,81		54.892.652.843,82	6,19
2015	940.139.328.400,40	891.378.886.503,26	94,81		48.760.441.897,14	5,18

Sumber: Data diolah Tahun 2017

Dari tabel IV.1 perhitungan diatas bahwa analisis varians (selisih), dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 anggaran dan realisasi pendapatan mengalami penurunan 96,06%. Pada tahun 2012 anggaran dan realisasi pendapatan mengalami peningkatan 97,31%. Pada tahun 2013 anggaran dan realisasi pendapatan mengalami penurunan 97.09%. Pada tahun 2014 anggaran dan realisasi pendapatan mengalami penurunan kembali 93,81%. Dan

pada tahun 2015 anggaran dan realisasi pendapatan mengalami peningkatan 94,81%. Rata-rata tahun 2011-2015 mencapai 95,82%.

Adapun grafik 1 pada anggaran dan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut :



Dari sisi komponen pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah juga masih belum mencapai target yang ditetapkan. Komponen pendapatan daerah yang realisasinya diatas target untuk tahun 2011-2015 adalah pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah . Adapun tabel dalam komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Komponen Pendapatan Daerah Pada Pemerintah Kota
Pematangsiantar Tahun 2011-2015

Komponen	Selisih (%)					Rata-rata %
	2011	2012	2013	2014	2015	
Pendapatan Asli Daerah	82,66	84,39	88,25	98,02	79,11	86,49
Pendapatan Transfer	103,32	99,48	99,68	94,88	98,80	99,32
Lain-lain Pendapatan yang Sah	34,27	88,61	58,00	57,60	64,35	60,57

Sumber: Data diolah Tahun 2017

Dilihat dari tabel IV.2 diatas bahwa dari tahun 2010-2013 pada Pendapatan Asli Daerah yang mana rata-ratanya mencapai 86,49%. Persentase yang paling tinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 98,02% dan persentase yang paling rendah adalah tahun 2015 yaitu sebesar 79,11%. Namun pada Pendapatan Transfer dari tahun 2011-2015 yang mana rata-ratanya mencapai 99,32% . Presentasinya yang paling tinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 100,32% dan presentase yang paling rendah adalah tahun 2014 yaitu sebesar 94,88%. Dan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2011-2015 yang mana rata-ratanya mencapai 60,57%. Presentase yang paling tinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 88,61% dan presentase yang paling rendah adalah tahun 2011 yaitu sebesar 34,27% .

b. Analisis Rasio Keuangan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan

yang diperlukan daerah. Adapun tabel kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

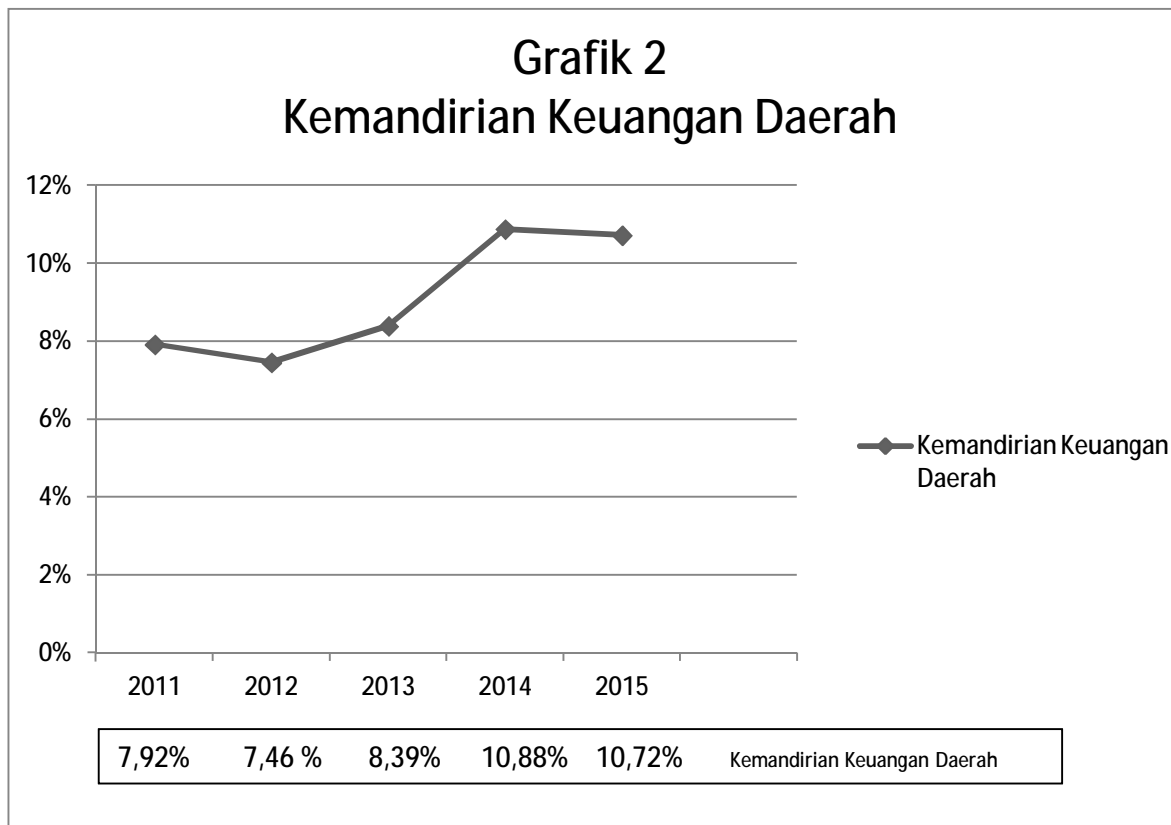
Tabel IV.3
Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar
Tahun 2011-2015

Tahun	PAD	Pendapatan	Rasio Kemandirian
2011	44.792.749.488,97	565.383.728.318,97	7,92%
2012	49.915.366.002,98	669.207.445.543,98	7,46%
2013	61.357.963.445,49	731.041.119.468,49	8,39%
2014	90.477.498.256,76	831.765.871.272,76	10,88%
2015	95.557.865.286,26	891.378.886.503,26	10,72%
Rata-rata			11,34%

Sumber: Data diolah Tahun 2017

Dari perhitungan tabel IV.3 diatas, bahwa kemandirian keuangan daerah Pada Pemerintah Kota Pematang Siantar pada tahun 2011-2015 adalah pada tahun 2011 kemandirian keuangan daerah mencapai 7,92 % dikatakan rendah sekali. Pada tahun 2012 kemandirian keuangan daerah mencapai 7,46 % dikatakan rendah sekali. Pada tahun 2013 kemandirian keuangan daerah mencapai 8,39 % dikatakan rendah sekali. Dan pada tahun 2014 kemandirian keuangan daerah mencapai 10,88 % dikatakan rendah sekali. Namun pada tahun 2015 kemandirian keuangan daerah mencapai 10,72 % dikatakan rendah sekali. Rata-rata 2011-2015 mencapai 11,34% dikatakan rendah sekali.

Adapun grafik 2 pada kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:



2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi PAD, Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Adapun efektivitas pajak daerah adalah sebagai berikut adalah:

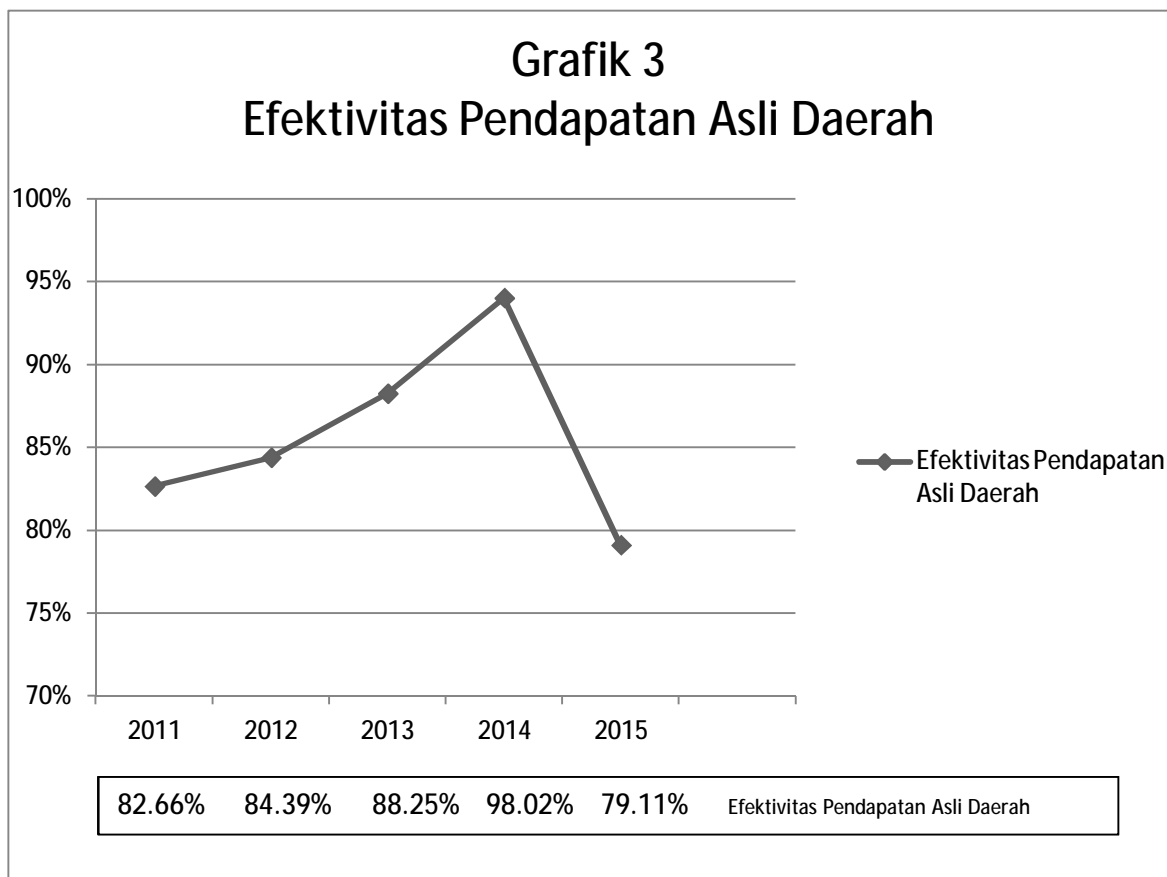
Tabel IV.4
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota
Pematangsiantar Tahun 2011-2015

Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas
2011	54.186.749.876,42	44.792.749.488,97	82,66 %
2012	59.146.308.083,00	49.915.366.002,98	84,39 %
2013	69.526.518.187,00	61.357.963.445,49	88,25 %
2014	92.301.487.715,85	90.477.498.256,76	98,02 %
2015	120.786.489.041,00	95.557.865.286,26	79,11 %
Rata-rata			86,49 %

Sumber: Data diolah Tahun 2017

Dari tabel IV.4 perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 2011-2015 adalah pada tahun 2011 efektivitas pendapatan asli mencapai 82,66 % dikatakan kurang efektif. Pada tahun 2012 mencapai 84,39% dikatakan kurang efektif. Pada tahun 2013 mencapai 88,25% dikatakan kurang efektif. Dan pada tahun 2014 mencapai 98,02% dikatakan cukup efektif. Namun pada tahun 2015 mencapai 79,11% dikatakan kurang efektif. Rata-rata tahun 2011-2015 mencapai 86,49% dikatakan kurang efektif.

Adapun grafik 3 pada Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:



Sedangkan rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang diterima. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 %. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Adapun tabel rasio efisiensi pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

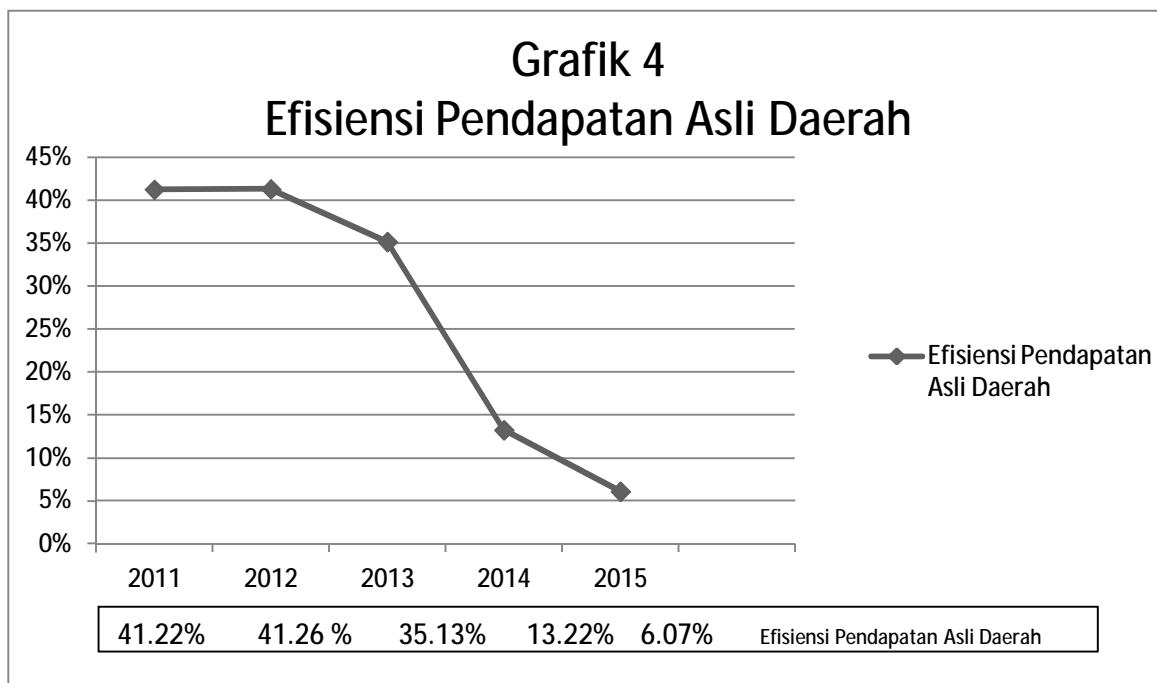
Tabel IV.5
Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar
Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Biaya Pemungutan PAD	Rasio Efisiensi %
2011	44.792.749.488,97	18.467.038.227,00	41,22
2012	49.915.366.002,98	20.595.629.787,00	41,26
2013	61.357.963.445,49	21.556.193.477,00	35,13
2014	90.477.498.256,76	11.965.498.400,00	13,22
2015	95.557.865.286,26	5.801.756.500,00	6,07
Rata-rata			27,38

Sumber: Data diolah Tahun 2017

Dari tabel IV.5 perhitungan diatas dapat dilakukan bahwa Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 20011-2015 adalah pada tahun 2011 efisiensi pendapatan asli daerah mencapai 41,22% dikatakan sangat tidak efisien. Pada tahun 2012 mencapai 41,26% dikatakan sangat tidak efisien. Pada tahun 2013 mencapai 35,13% dikatakan sangat tidak efisien. Selanjutnya pada tahun 2014 mencapai 13,22% dikatakan cukup efisien. Dan pada tahun 2015 mencapai 6,07% dikatakan efisien.

Adapun grafik 4 pada Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:



3. Deskriptif Data pada Analisis Kinerja Belanja

Dengan menggunakan data APBD dan Realisasi APBD, dilakukan Analisis Kinerja dengan menggunakan alat ukur kinerja:

1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Belanja

Analisis varians memberikan informasi tentang perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja belanja yang kurang baik.

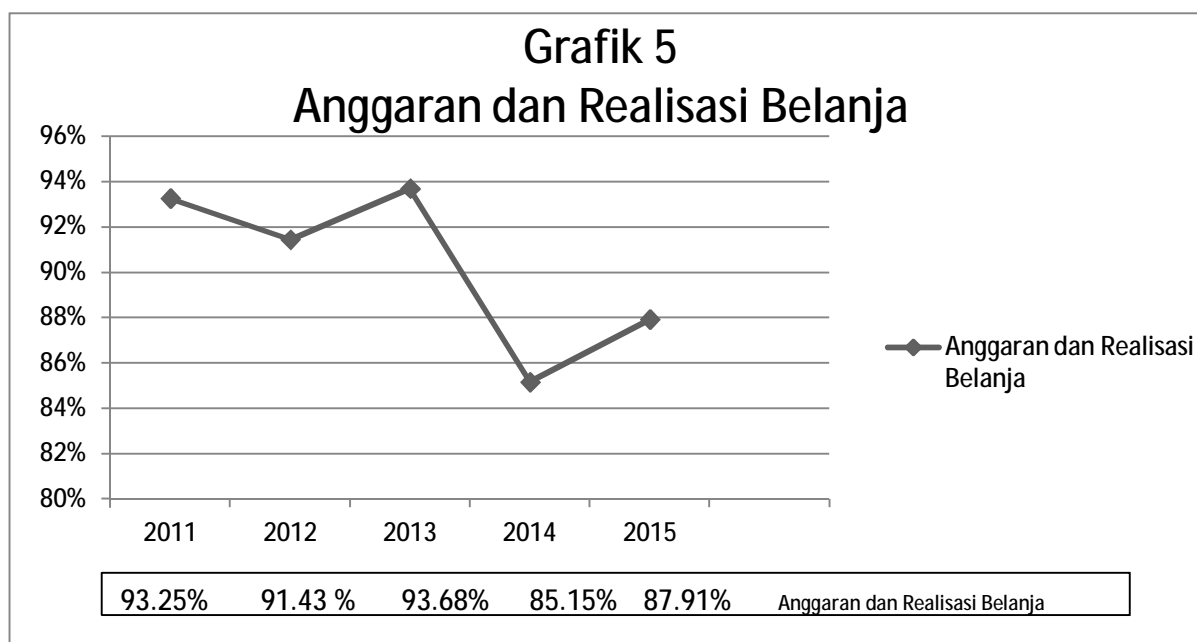
Tabel IV.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar
Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Rata-rata %	Selisih	%
					Rp	
2011	605.675.217.770,81	564.819.922,154,76	93,25	89,48	40.855.295.616,05	6,94
2012	699.561.538.421,72	639.607.159.845,00	91,43		59.954.378.576,72	8,57
2013	791.040.615.348,43	741.073.062.641,54	93,68		49.967.552.706,89	6,31
2014	909.447.084.012,15	774.365.721.075,38	85,15		135.081.362.937,77	14,85
2015	1.005.717.689.322,35	884.146.657.675,53	87,91		121.571.031.646,82	12,08

Sumber: Data diolah Tahun 2017

Dari tabel IV.6 perhitungan diatas bahwa analisis varians (selisih), dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 anggaran dan realisasi belanja mencapai 93,25%. Pada tahun 2012 anggaran dan realisasi belanja mencapai 91,43%. Pada tahun 2013 anggaran dan realisasi belanja mencapai 93,68%. Selanjutnya pada tahun 2014 anggaran dan realisasi belanja mencapai 85,15%. Dan pada tahun 2015 anggaran dan realisasi mencapai 87,91%. Rata-rata tahun 2011-2015 mencapai 89,48%.

Adapun grafik 5 pada anggaran dan realisasi belanja pada Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :



2. Analisis Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Adapun rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7
Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015

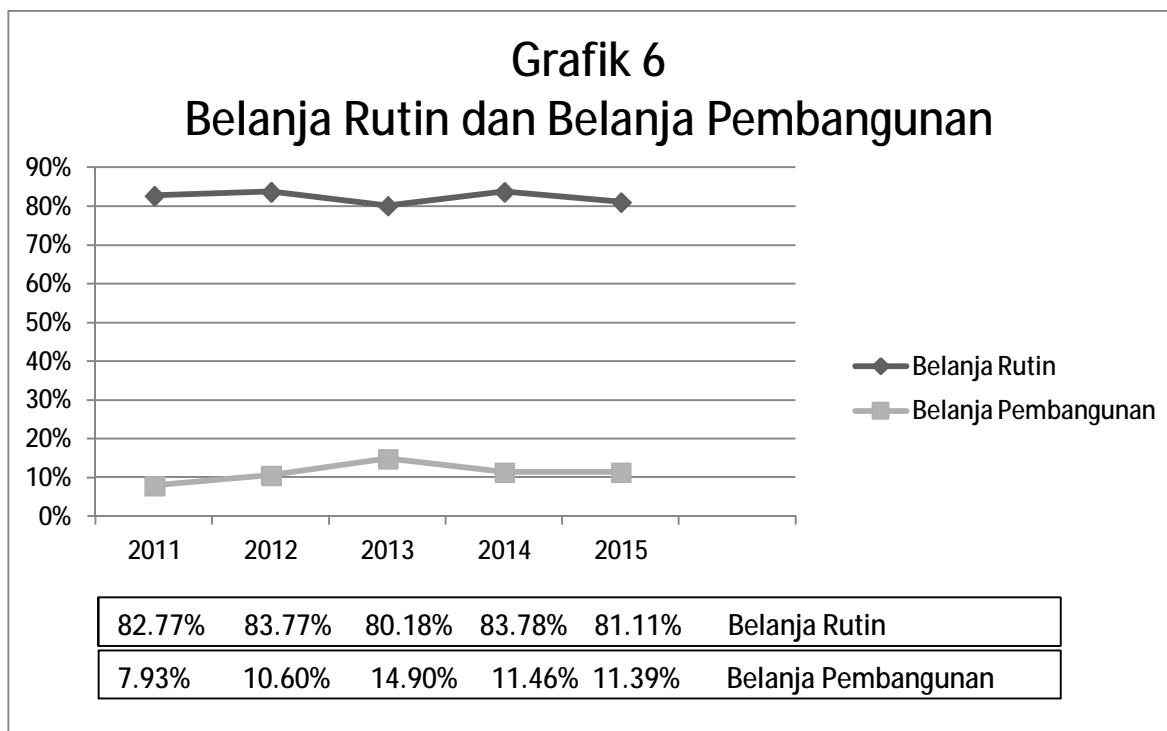
Rasio	Tahun					Rata-rata %
	2011	2012	2013	2014	2015	
Rasio Belanja Rutin terhadap Total Belanja (Total Belanja Rutin/Total Belanja) x 100%	82,77%	83,77%	80,18%	83,78%	81,11%	82,32 %
Rasio Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja (Total Belanja Pembangunan/Total Belanja) x 100%	7,93%	10,60%	14,90%	11,46%	11,39%	11,30 %

Sumber: Data diolah Tahun 2017

Dari tabel IV.7 perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 2011-2015 adalah pada tahun 2011 rasio belanja rutin terhadap total belanja mencapai 82,77% dan rasio belanja pembangunan terhadap total belanja mencapai 7,93%. Pada tahun 2012 rasio belanja rutin terhadap total belanja mencapai 83,77% dan rasio belanja pembangunan terhadap total belanja mencapai 10,60%. Pada tahun 2013 rasio belanja rutin terhadap total belanja mencapai 80,18% dan rasio belanja pembangunan terhadap total belanja mencapai 14,90%. Selanjutnya pada tahun 2014 rasio belanja rutin terhadap total belanja mencapai 83,78% dan rasio belanja

pembangunan terhadap total belanja mencapai 11,46%. Dan pada tahun 2015 rasio belanja rutin terhadap total belanja mencapai 81,11% dan rasio belanja pembangunan terhadap total belanja mencapai 11,39%. Rata-rata tahun 2011-2015 pada rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan terhadap total belanja adalah 82,32% dan 11,30%.

Adapun grafik 6 pada belanja rutin dan belanja pembangunan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :



3. Analisis Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap Total Belanja

Adapun rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal Terhadap Total Belanja adalah sebagai berikut:

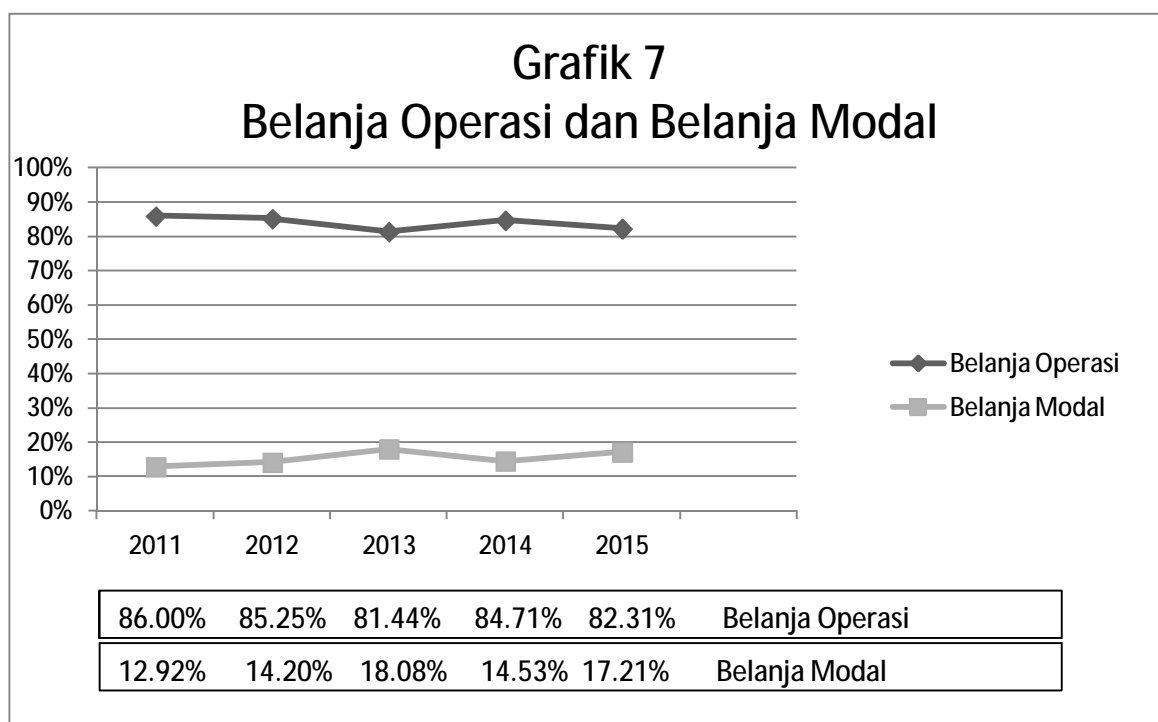
Tabel IV.8
Belanja Operasi dan Belanja Modal Pada Pemerintah Kota
Pematangsiantar Tahun 2011-2015

Rasio	Tahun					Rata-rata %
	2011	2012	2013	2014	2015	
Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja (Total Belanja Operasi/Total Belanja) x 100%	86,00%	85,25%	81,44%	84,71%	82,31%	83,94%
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (Total Belanja Modal/Total Belanja) x 100%	12,92%	14,20%	18,08%	14,53%	17,21%	15,39%

Sumber: Data diolah Tahun 2017

Dari tabel IV.8 perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa Belanja Operasi dan Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 2011-2015 adalah pada tahun 2011 rasio belanja operasi terhadap total belanja mencapai 86,00% dan rasio belanja modal terhadap total belanja mencapai 12,92%. Pada tahun 2012 rasio belanja operasi terhadap total belanja mencapai 85,25% dan rasio belanja modal terhadap total belanja mencapai 14,20%. Pada tahun 2013 rasio belanja operasi terhadap total belanja mencapai 81,44% dan rasio belanja modal terhadap total belanja mencapai 18,08%. Selanjutnya pada tahun 2014 rasio belanja operasi terhadap total belanja mencapai 84,71% dan rasio belanja modal terhadap total belanja mencapai 14,53%. Dan pada tahun 2015 rasio belanja operasi terhadap total belanja mencapai 82,31% dan rasio belanja modal terhadap total belanja mencapai 17,21%. Rata-rata tahun 2011-2015 pada rasio belanja operasi dan rasio belanja modal terhadap total belanja adalah 83,94% dan 15,39%.

Adapun grafik 7 pada belanja operasi dan belanja modal pada Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :



B. Pembahasan

1. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah

Setelah dilakukan analisis varians (selisih) data kinerja anggaran pendapatan dari tahun 2011-2015 dapat diketahui gambaran analisis kinerja pendapatan dalam menilai kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar yang menunjukkan Pendapatan Kota Pematangsiantar dapat dikatakan baik. Meskipun belum terlampaui target anggarannya. Hal ini menunjukkan dengan target anggaran pendapatan dari tahun 2011-2015 yang rata-ratanya mencapai 95,82%. Pada tahun 2011 selisihnya mencapai 96,06%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan retribusi daerah hanya mencapai 82,92% dan lain-lain PAD yang sah hanya

mencapai 66,92%. Selanjutnya, pada tahun 2012 selisihnya mencapai 97,31% dimana rata-rata selisih antara anggaran dan realisasinya mencapai 95,82%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan retribusi daerah hanya mencapai 82,40% dan lain-lain PAD yang sah hanya mencapai 58,71%. Selanjutnya, pada tahun 2013 selisihnya mencapai 97,09% dimana rata-rata selisih antara anggaran dan realisasinya mencapai 95,82%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan retribusi daerah hanya mencapai 91,51% dan lain-lain PAD yang sah hanya mencapai 94,45%. Selanjutnya, pada tahun 2014 selisihnya mencapai 93,81% dimana rata-rata selisih antara anggaran dan realisasinya mencapai 95,82%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan retribusi daerah hanya mencapai 84,84% dan lain-lain PAD yang sah melebihi target yang dianggarkan yaitu mencapai 107,09%. Dan, pada tahun 2015 selisihnya mencapai 94,81% dimana rata-rata selisih antara anggaran dan realisasinya mencapai 95,82%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan pajak daerah mencapai 91,47% dan lain-lain PAD yang sah hanya mencapai 76,57%.

Adapun sisi komponen dari Pendapatan daerah itu sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Yang dimana pada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri rata-ratanya mencapai 86,49%. Pada tahun 2011 pendapatan asli daerah mencapai 82,66% dimana rata-ratanya mencapai 86,49%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan pajak daerah mencapai 82,66%. Selanjutnya, pada tahun 2012 mencapai 84,39% dimana rata-ratanya mencapai 86,49%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan pajak daerah mencapai 88,64%. Selanjutnya, pada tahun 2013 mencapai 88,25% dimana rata-ratanya mencapai 86,49%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan pajak daerah mencapai 91,51%. Selanjutnya, pada tahun 2014 mencapai 98,02% dimana rata-

ratanya mencapai 86,49%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan pajak daerah mencapai 91,07%. Dan, pada tahun 2015 mencapai 79,11% dimana rata-ratanya mencapai 86,49%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan retribusi daerah mencapai 53,07% kurang dari target.

Pada Pendapatan Transfer rata-ratanya mencapai 99,32%. Dimana pada tahun 2011 mencapai target yaitu 103,32% dimana rata-ratanya mencapai 99,32%. Hal ini disebabkan oleh dana bagi hasil sumber daya alam melebihi dari target yaitu mencapai 698,00%. Selanjutnya, pada tahun 2012 mencapai 99,48% dimana rata-ratanya mencapai 99,32%. Hal ini disebabkan oleh dana bagi hasil sumber daya alam melebihi dari target yaitu mencapai 184,89%. Selanjutnya, pada tahun 2013 mencapai 99,68% dimana rata-ratanya mencapai 99,32%. Hal ini disebabkan oleh dana bagi hasil sumber daya alam mencapai 77,13%. Selanjutnya, pada tahun 2014 mencapai 94,88% dimana rata-ratanya mencapai 99,32%. Hal ini disebabkan oleh dana bagi hasil pajak mencapai 90,92%. Dan, pada tahun 2015 mencapai 98,80% dimana rata-ratanya mencapai 99,32%. Hal ini disebabkan oleh dana bagi hasil pajak mencapai 71,42%.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah rata-ratanya mencapai 60,57%. Pada tahun 2011 mencapai 34,27% dimana rata-ratanya mencapai 60,57%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan lainnya mencapai 34,27%. Selanjutnya pada tahun 2012 mencapai 88,61% dimana rata-ratanya mencapai 60,57%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan lainnya mencapai 88,61%. Selanjutnya pada tahun 2013 mencapai 58,00% dimana rata-ratanya mencapai 60,57%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan lainnya mencapai 58,00%. Selanjutnya pada tahun 2014 mencapai 57,60% dimana rata-ratanya mencapai

60,57%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan lainnya mencapai 57,60%. Dan pada tahun 2015 mencapai 64,35% dimana rata-ratanya mencapai 60,57%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan lainnya mencapai 64,35%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam komponen Pendapatan daerahnya pada tahun 2011-2015 dapat dikatakan baik.

Analisis Rasio Keuangan yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah bahwa kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar masuk dalam kemampuan rendah sekali dan mempunyai kecenderungan menurun. Rata-rata rasio kemandirian keuangan yaitu 11,34% \square 100%. Pada tahun 2011 mencapai 7,92% dimana rata-ratanya mencapai 11,34%. Hal ini disebabkan total pendapatan yang mencapai 96,06%. Selanjutnya pada tahun 2012 mencapai 7,46% dimana rata-ratanya mencapai 11,34% .Hal ini disebabkan total pendapatan yang mencapai 97,31% . Selanjutnya pada tahun 2013 mencapai 8,39% dimana rata-ratanya mencapai 11,34% .Hal ini disebabkan total pendapatan yang mencapai 97,09% . Selanjutnya pada tahun 2014 mencapai 10,88% dimana rata-ratanya mencapai 11,34% .Hal ini disebabkan total pendapatan yang mencapai 93,81%. Dan, pada tahun 2015 mencapai 10,72% dimana rata-ratanya mencapai 11,34% .Hal ini disebabkan total pendapatan yang mencapai 94,81% .

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah bahwa efektivitas pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 2011-2015 dikatakan kurang efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya yang direncanakan dengan rata-rata rasio efektivitas pendapatan asli daerah yaitu 86,49% \square 100% dikatakan kurang efektif. Pada tahun 2011 mencapai 82,66%

dimana rata-ratanya mencapai 86,49%. Pada tahun 2012 mencapai 84,39% dimana rata-ratanya mencapai 86,49% . Pada tahun 2013 mencapai 88,25% dimana rata-ratanya mencapai 86,49% . Selanjutnya pada tahun 2014 mencapai 98,02% dimana rata-ratanya mencapai 86,49% . Dan pada tahun 2015 mencapai 79,11% dimana rata-ratanya mencapai 86,49% .

Sedangkan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah bahwa efisiensi pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 2011-2015 dikatakan kurang efisien dalam merealisasikan pajak daerahnya yang direncanakan dengan rata-rata rasio efisiensi pendapatan asli daerah yaitu 27,38% □ 100% dikatakan kurang efisien. Pada tahun 2011 mencapai 41,22% dimana rata-ratanya mencapai 27,38%. Pada tahun 2012 mencapai 41,26% dimana rata-ratanya mencapai 27,38% . Pada tahun 2013 mencapai 35,13% dimana rata-ratanya mencapai 27,38% . Selanjutnya pada tahun 2014 mencapai 13,22% dimana rata-ratanya mencapai 27,38% . Dan pada tahun 2015 mencapai 6,07% dimana rata-ratanya mencapai 27,38% .

Analisis varians belanja memberikan informasi tentang perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja belanja yang kurang baik. Dari perhitungan diatas bahwa analisis varians (selisih) kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar dikatakan baik karena dari tahun 2011-2015 realisasi belanja tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan. Pada tahun 2011 anggaran dan realisasinya mencapai 93,25%. Pada tahun 2012 anggaran dan realisasi

mencapai 91,43%. Pada tahun 2013 anggaran dan realisasi mencapai 93,68%. Selanjutnya pada tahun 2014 anggaran dan realisasi mencapai 85,15%. Dan pada tahun 2015 anggaran dan realisasi mencapai 87,91%. Realisasi belanja daerah yang paling rendah terjadi pada tahun 2014. Rata-rata tahun 2011-2015 mencapai 89,48%. Apabila seluruh kegiatan yang direncanakan telah terlaksana, ini menunjukkan telah terjadinya pengendalian anggaran yang ketat yang telah dilakukan oleh pemerintah kota pematangsiantar, maka hal ini merupakan suatu prestasi bagi Kota Pematangsiantar.

Pada Belanja Rutin rata-ratanya mencapai 82,32%. Pada tahun 2011 mencapai 82,77% dimana rata-ratanya mencapai 82,32%. Hal ini disebabkan oleh belanja pegawai mencapai 96,77%. Pada tahun 2012 mencapai 83,77% dimana rata-ratanya mencapai 82,32%. Hal ini disebabkan oleh belanja pegawai mencapai 94,90%. Pada tahun 2013 mencapai 80,11% dimana rata-ratanya mencapai 82,32%. Hal ini disebabkan oleh belanja pegawai mencapai 95,88%. Selanjutnya pada tahun 2014 mencapai 83,78% dimana rata-ratanya mencapai 82,32%. Hal ini disebabkan oleh belanja barang dan jasa mencapai 84,92%. Dan pada tahun 2015 mencapai 81,11% dimana rata-ratanya mencapai 82,32%. Hal ini disebabkan oleh belanja barang dan jasa mencapai 84,62%.

Belanja Pembangunan rata-ratanya mencapai 11,30%. Pada tahun 2011 mencapai 7,93% dimana rata-ratanya mencapai 11,30%. Hal ini disebabkan oleh belanja peralatan mesin mencapai 76,57%. Pada tahun 2012 mencapai 10,60% dimana rata-ratanya mencapai 11,30%. Hal ini disebabkan oleh belanja peralatan mesin mencapai 73,83%. Pada tahun 2013 mencapai 14,90% dimana rata-ratanya mencapai 11,30%. Hal ini disebabkan oleh belanja gedung dan bangunan

mencapai 86,54%. Selanjutnya pada tahun 2014 mencapai 11,46% dimana rata-ratanya mencapai 11,30%. Hal ini disebabkan oleh belanja gedung dan bangunan mencapai 77,71%. Dan pada tahun 2015 mencapai 11,39% dimana rata-ratanya mencapai 11,30%. Hal ini disebabkan oleh belanja gedung dan bangunan mencapai 97,71%. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 2011-2015 cukup baik.

Belanja Operasi rata-ratanya mencapai 83,94%. Pada tahun 2011 mencapai 86,00% dimana rata-ratanya mencapai 83,94%. Hal ini disebabkan oleh belanja pegawai mencapai 96,77%. Pada tahun 2012 mencapai 85,25% dimana rata-ratanya mencapai 83,94%. Hal ini disebabkan oleh belanja barang mencapai 90,47%. Pada tahun 2013 mencapai 81,44% dimana rata-ratanya mencapai 83,94%. Hal ini disebabkan oleh belanja pegawai mencapai 95,88%. Selanjutnya pada tahun 2014 mencapai 84,71% dimana rata-ratanya mencapai 83,94%. Hal ini disebabkan oleh belanja barang mencapai 84,92%. Dan pada tahun 2015 mencapai 82,31% dimana rata-ratanya mencapai 83,94%. Hal ini disebabkan oleh bantuan keuangan mencapai 100,00%.

Belanja Modal rata-ratanya mencapai 15,39%. Pada tahun 2011 mencapai 12,92% dimana rata-ratanya mencapai 15,39%. Hal ini disebabkan oleh belanja tanah mencapai 34,03%. Pada tahun 2012 mencapai 14,20% dimana rata-ratanya mencapai 15,39%. Hal ini disebabkan oleh belanja peralatan dan mesin mencapai 73,83%. Pada tahun 2013 mencapai 18,08% dimana rata-ratanya mencapai 15,39%. Hal ini disebabkan oleh belanja gedung dan bangunan mencapai 86,54%. Selanjutnya pada tahun 2014 mencapai 14,53% dimana rata-ratanya mencapai 15,39%. Hal ini disebabkan oleh belanja peralatan dan mesin

mencapai 88,81%. Dan pada tahun 2015 mencapai 17,21% dimana rata-ratanya mencapai 15,39%. Hal ini disebabkan oleh peralatan mesin mencapai 91,15%.

2. Membandingkan Antara Teori dan Praktek Yang Diterapkan Pemerintah Kota Pematangsiantar Serta Memberika Suatu Perbaikan Yang Diperlukan

Analisis Varians (selisih) Anggaran Pendapatan menunjukkan tidak sesuai dengan teori (Abdul Halim : 2004) yang menyatakan apabila realisasi melampaui anggaran maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal ini dinilai kurang baik yaitu diatas 100%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar akan mampu melampaui pendapatan dari yang ditargetkan. Perbaikan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam memperbaiki kinerjanya dengan memperhatikan urusan wajib dan pilihan. Pada sisi pendapatan daerah terdapat target pendapatan asli daerah tidak terealisasi seseuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan pendapatan transfer terdapat beberapa target melebihi dari potensi yang ada, serta pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak terealisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori (Abdul Halim, 2004 : 232) yang menyatakan bahwa semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemampuan daerahnya. Pencapaian dari rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah rendah sekali dan cenderung menurun. Perbaikan yang

harus dilakukan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar masih ketergantungan atas sumber dana baik dari pemerintah pusat/provinsi maupun pinjaman. Untuk itu perlu adanya usaha pemerintah daerah untuk dapat mengurangi ketergantungan atas sumber dana ekstern dan meminta kewenangan untuk dikuasai pemerintah pusat ataupun provinsi seperti pajak kendaraan bermotor.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori (Abdul Halim, 2004 : 234) yang menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar akan mampu menghasilkan tingkat kinerja yang lebih bila dilihat dari Pendapatan Asli Daerahnya yang dihasilkan dalam Pajak Daerah. Perbaikan yang harus dilakukan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebaiknya memperbaiki tingkat Pendapatan daerah, baik dilihat dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori (Abdul Halim, 2004 : 235) yang menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar akan mampu menghasilkan tingkat kinerja yang cukup baik bila dilihat dari Pendapatan Asli Daerahnya. Perbaikan yang harus dilakukan sebaiknya Pemerintah Kota

Pematangsiantar harus memperhatikan penggunaan dana dalam biaya pemungutan daerah.

Analisis Varians (selisih) Anggaran Belanja menunjukkan kesesuaian dengan teori (Mardiasmo : 2004) yang menyatakan kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih rendah dari yang dianggarkan, jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengidentifikasi adanya kinerja anggaran yang kurang baik.

Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan menunjukkan tidak sesuai dengan teori kecil (Abdul Halim 2004 : 238) yang menyatakan bahwa semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam analisis Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan mengalami signifikan. Yang artinya kinerja Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan yang dikatakan positif dan negatif. Hal tersebut dikatakan kinerja cukup baik. Perbaikan yang harus dilakukan Pemerintah Kota Pematangsiantar pada belanja rutin dan belanja pembangunan dengan cara mengurangi kebutuhan yang tidak penting untuk dapat mengalokasikan dana APBD kepada kebutuhan yang lainnya .

Belanja Operasi dan Belanja Modal menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori (Mardiasmo : 2004) yang menyatakan bahwa Kinerja Pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih rendah dari yang dianggarkan, maka hal itu mengidentifikasi adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Pencapaian ini menunjukkan rasio belanja modal relative kecil dibandingkan

dengan rasio belanja operasi. Ini menunjukkan bahwa dari total belanja lebih besar dialokasikan untuk belanja yang terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Perbaikan yang harus dilakukan dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu adanya penghematan dalam belanja pegawai, agar terhindar dari pemborosan penggunaan dana APBD.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan dalam batas kemampuan penulis. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam kinerja pendapatan Pemerintah Kota Pematangsiantar dilihat dari analisis varians secara umum kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat dikatakan baik, meskipun belum terlampaui target dalam anggarannya.
2. Dari sisi Komponen Pendapatan Daerah, dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar dikatakan baik.
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar masuk dalam kemampuan rendah sekali dan cenderung menurun, kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar dikatakan tidak baik.
4. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah dalam pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar masuk dalam kinerja yang kurang efektif bila dilihat dari rasio efektifnya. Sedangkan dalam rasio efisiensi pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dikatakan kurang efisien.
5. Dalam kinerja Belanja Pemerintah Kota Pematangsiantar dilihat dari analisis varians secara umum kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat dikatakan

baik karena dari tahun 2011-2015 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan.

6. Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam kinerjanya dikatakan cukup baik.
7. Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dikatakan cukup baik.

B. KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan dari berbagai faktor, antara lain:

1. Periode penelitian ini hanya terbatas untuk tahun 2011-2015.
2. Penelitian ini tidak menganalisis keseluruhan unsur APBD sehingga tidak dapat memperoleh hasil analisis yang lengkap dan menyeluruh.

C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar
 1. Sebaiknya Pemerintah Kota Pematangsiantar memperhatikan pendapatan daerah yang dilihat dari pendapatan asli daerahnya, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah dalam peningkatan pendapatan. Perlu memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalan potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah .
 2. Sebaiknya dalam komponen pendapatan Pemerintah Kota Pematangsiantar harus memperhatikan penggunaan dana dalam mengalokasikan pendapatan

daerah dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota. POLRI dan instansi penghasil.

3. Sebaiknya rasio kemandirian daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar harus memperhatikan bantuan kepada Pemerintah pusat, agar tidak terjadi pemborosan dana dalam pengurangan Pendapatan Asli daerah.
4. Sebaiknya dalam efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar harus meningkatkan pelaksanaan secara optimalisasi dalam pemungutan pajak sesuai dengan potensi yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Sebaiknya Pemerintah Kota Pematangsiantar harus dapat mengurangi urusan wajib dan urusan pilihan dengan memilah kebutuhan yang memang menjadi rutin dan dibutuhkan dalam Pemerintah Kota Pematangsiantar agar tidak terjadinya pemborosan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
6. Sebaiknya Pemerintah Kota Pematangsiantar harus dapat menghemat Pendapatan Asli Daerah dalam merealisasikan kebutuhan didalam kegiatan pemerintah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya, hendaknya menambah rasio yang digunakan, objek penelitian, tahun yang digunakan dan menganalisis keseluruhan unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dapat memperoleh hasil yang lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul , Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Addina, Marizka.2010. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota* (Skripsi S1). Universitas Sumatera Utara
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Eka, Rosalina. 2008. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat. (Thesis S2). Universitas Gadjah Mada.
- Kiki Rizki Ana Pohan 2015. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara* (Skripsi S1). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. UUP STIM YKPN*, Yogyakarta.
- Erlina, SriMulyadi. 2007. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. USU Press, Medan.
- Mardiasmo, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nirzawan. 2001. *Tinjauan Umum terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara*. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. UPP YKPN.
- Republik Indonesia, *Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- _____, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- _____, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- _____, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Peraturan Daerah*.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2007*.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____ Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 dan Kepmendagri
nomor 35 tentang *Pajak Daerah*

_____ Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang *Retrebusi*
Daerah